

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 225 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERKARA PKPU PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA

Oleh:

MUNAWIR FUAD

E1A116084

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Namun, UUK menentukan dalam permohonannya dapat dilakukan oleh kreditor. Salah satu perkara PKPU yang pengajuannya dimohonkan oleh para kreditornya adalah PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata. Berada dalam masa PKPU selama 9 bulan, PT. First Anugerah Karya Wisata dibantu oleh Pengurus dalam mengurus hartanya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 225 ayat 3 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perkara PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dengan Pengurus PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata, dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Pengurus PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata telah menerapkan Pasal 225 ayat (3) sebagai dasar untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yang secara garis besar terdapat 2 (dua) hal, yaitu pertama terhadap pengurusan administrasi PKPU dan yang kedua terhadap pengurusan harta PT. First Anugerah Karya Wisata itu sendiri.

Kata Kunci: Penerapan, PKPU, Pengurus, PT. First Anugerah Karya Wisata

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 225 PARAGRAPH 3 LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT IN THE PKPU CASE OF PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA

By:

MUNAWIR FUAD

E1A116084

Suspension of Payment (PKPU) is basically an offer of a peace plan by the debtor. However, the regulations determine in its application that creditors can make it. One of the Suspension of Payment cases whose creditors filed filing was towards PT. First Anugerah Karya Wisat. Being in the Suspension of Payment period for 9 months, PT. First Anugerah Karya Wisata is assisted by the Management in managing its assets, this is as stipulated in Article 225 paragraph (3) of the Bankruptcy and Suspension of Payment Law. This research aims to determine the application of Article 225 paragraph (3) of Law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment obligations in the case of PT. First Anugerah Karya Wisata.

The research method used in this research is normative juridical with qualitative normative analysis. The research specification uses descriptive research. The data collection method is done by using secondary data through library research and primary data through interviews with PT. First Anugerah Karya Wisata Management under suspension of payment, with the method of presenting data in the form of narrative text and arranged systematically.

The results of this research show that the PT. First Anugerah Karya Wisata Management Team has applied Article 225 paragraph (3) as the basis for carrying out its duties and authorities which in general there are 2 (two) things, the first for Suspension of Payment administration and the second for the management of PT. First Anugerah Karya Wisata assets itself.

Keywords: Implementation, Suspension of Payment, Management, PT. First Anugerah Karya Wisata